

**ANALISA KONFLIK HUKUM WEWENANG PENGAWASAN KEGIATAN
PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2014**

Title	ANALISA KONFLIK HUKUM WEWENANG PENGAWASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2014
Author Order	1 of 1
Accreditation	2
Abstract	<p>Pasca berlakunya UU Pemda 2014, konflik wewenang dalam penegakan hukum administratif melalui pengawasan dapat terjadi antara dua tingkat pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan bergeser kepada provinsi sejalan dengan pengalihan wewenang penerbitan izin pertambangan yang semula berada di kabupaten/kota, sementara wewenang bupati/walikota dalam UU Minerba belum dicabut. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsi dan menganalisis konflik norma serta memecahkan dilema penegakan hukum adminsitratif melalui pengawasan dalam pengelolaan pertambangan. Metode yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah pendekatan yuridis normatif. Informasi dan data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan metode interpretasi hukum maupun berdasar asas-asas hukum yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagai peraturan baru dan umum, UU Pemda mempunyai posisi lebih kuat dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun demikian, usaha pertambangan yang lebih banyak berada di wilayah kabupaten/kota menuntut pengawasan kegiatan pertambangan oleh provinsi harus mengikutsertakan bupati/walikota berdasarkan tugas pembantuan (medebewind).</p>
Publisher Name	Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)
Publish Date	2024-01-25
Publish Year	2017
Doi	
Citation	
Source	Bina Hukum Lingkungan
Source Issue	Vol. 2 No. 1 (2017): Bina Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017
Source Page	30-39
Url	http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/24/8
Author	Dr. KARTONO, S.H., M.H